

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Abhan, 2016, *Jejak Kasus Pidana (Catatan Penegakan Hukum Pemilu di Jateng)*, CV. Rafi Sarana Perkasa, Semarang.
- Anwar Chairul, 1999, *Konstitusi dan Kelembagaan Negara*, Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta.
- Atmosudiro S. Prajudi, 1988, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Azhary, 1995, *Negara Hukum Indonesia*, UI Press, Jakarta.
- Budiarjo Miriam, 1998, *Partisipasi dan Partai Politik : Sebuah Bunga Rampai*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Fadjar Mukthie, 2013, *Pemilu Perselisihan Hasil Pemilu dan Demokrasi Membangun Pemilu Legislatif, Presiden, dan Kepala Daerah dan penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu Secara Demokratis*, Setara Press, Malang Jatim.
- Fajar ND Mukhti, dan Achmad Yulianto, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Falaak Mohammad Fajrul, 2014, *Konsisten Mengawal Konstitusi*, Komisi Hukum Nasional, Jakarta.
- Harun Refly, 2016, *Pemilu Konstitusional: Desain Penyelesaian Sengketa Pemilu Kini dan ke Depan*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Handoyo B Hestu Cipto, 2009, *Hukum Tata Negara Indonesia: Menuju Konsolidasi Sistem Demokrasi*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.
- Irianto, Sulistyowati dan Shidarta (editor), 2011, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.

- Junaidi Veri, 2013, *Pelibatan dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pemilu*, Perludem dan TAF, Jakarta.
- M. Gaffar Janedjri, 2013, *Demokrasi dan Pemilu di Indonesia*, Konpress, Jakarta.
- Marbun, S.F., 2012, *Hukum Administrasi Negara I*, UII Press, Yogyakarta.
- MD M. Mahfud, 2009, *Politik Hukum di Indonesia*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Minarno Nur Basuki, 2011, *Penyalahgunaan Wewenang dalam Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berimplikasi Tindak Pidana Korupsi*, Laksbang Mediatama, Surabaya.
- MS Subur, 2014, *Bunga Rampai Peradilan Administrasi Koentendorer*, Genta Press, Yogyakarta.
- Saputra, M. Nata, 1988, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali, Jakarta.
- Sarja H, 2016, *Negara Hukum; Teori dan Praktek*, Thafa Media, Yogyakarta.
- Soekanto Soerjono, dan Mamudji Sri, 2006, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Sumardjono Maria SW, 1989, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*, tanpa penerbit, Yogyakarta.
- Supriyanto Didik, 2007, *Menjaga Independensi Penyelenggara Pemilu*, Perludem, Jakarta.
- Supriyanto Didik, 2006, *Efektivitas Panwas: Evaluasi Pengawas Pemilu 2004*, Perludem, Jakarta.
- Supriyanto Didik, Junaidi Veri, Darmawan Devi, 2015, *Penguatan Bawaslu: Optimalisasi Posisi, Organisasi, dan Fungsi dalam Pemilu 2014*, Perludem, Jakarta.
- Suswanto Gunawan, 2015, *Pengawasan Pemilu Partisipatif*, Penerbit Erlangga, Surabaya.
- Yuliant, Junaidi Veri, Mellaz August, 2010, *Position Paper, Memperkuat Kemandirian Penyelenggara Pemilu*, KRHN, Jakarta.

Zaidun Muhammad, Kasim Ifdhal, 1996, *Mendemokratiskan Pemilu*, ELSAM, Jakarta Selatan.

## B. Tesis

Muhammad Irfan Fuadi, 2014, “Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan Umum”, *Tesis*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

Bagus Sarwono, 2014, “Manajemen Sumberdaya Manusia Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota Se-DIY Pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014”, *Tesis*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

## C. Peraturan Perundang-Undangan

UUD 1945. Periode 18 Agustus 1945 – 27 Desember 1949

Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Periode 27 Desember 1949 – 17 Agustus 1950

Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Periode 17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945).

Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898).

Undang-Undang No. 7 Tahun 1953 tentang Pemilihan Anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 29).

Undang-Undang No. 4 Tahun 1975 tentang Perubahan Undang-Undang No. 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3063)

Undang-Undang No. 2 Tahun 1980 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Undang-

undang No. 4 tahun 1975, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3163)

Undang- Undang No. 1 Tahun 1985 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan Perwakilan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 1975 dan Undang-Undang No. 2 Tahun 1980, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3281)

Undang-Undang No. 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3810)

Undang-Undang No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277).

Undang-Undang No. 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721).

Undang-Undang No. 2 tahun 2008 tentang Partai Politik, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801).

Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4836).

Undang-Undang No. 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).

Undang-Undang No. 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924).

Undang-Undang No. 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043).

Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189).

Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246).

Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).

Keppres No. 188 tahun 1955 tentang Panitia Pemilihan Umum

#### D. Sumber Lain

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 11/PUU-VIII/2010.

Zainal Arifin Muchtar, Dosen fakultas Hukum UGM, wawancara tanggal 4 Januari 2018.

Muhammad, *Kesiapan Bawaslu dalam Pengawasan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden*, pemaparan yang disampaikan pada rapat kordinasi nasional dalam rangka pemantapan pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014.

Fitrianaida, Artikel Pemilu, 2013 <http://fitrianaida.blogspot.com/2013/04/peserta-partai-politik-Pemilu-tahun-1955.html> diakses tgl 1 Maret 2017.

<http://www.antaraneews.com/Pemilu/berita/421353/sejarah-Pemilu-Pemilu-era-orde-baru-1966-1998> diakses tgl 1 Maret 2017.

[http://kepuustakaanpresiden.pnri.go.id/election/directory/election/?box=detail&id=27&from\\_box=list&hlm=1&search\\_ruas=&search\\_keyword=&activation\\_status=](http://kepuustakaanpresiden.pnri.go.id/election/directory/election/?box=detail&id=27&from_box=list&hlm=1&search_ruas=&search_keyword=&activation_status=) diakses tgl 2 Februari 2017.

Saldi Isra, Artikel tentang Legitimasi Pemilu 2003 <https://www.saldiisra.web.id/index.php/tulisan/artikel-koran/11-artikelkompas/277-menyelamatkan-legitimasi-pemilu.html> diakses tanggal 7 Januari 2018.